



Dua Pejabat Bengkayang Ditahan

Kasus Penyelewengan Dana Bansus

PONTIANAK - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar menahan dua pejabat di Kabupaten Bengkayang berinisial BB dan IR. Kedua pejabat itu ditahan atas kasus dugaan korupsi dana

Bantuan Khusus (Bansus) Kabupaten Bengkayang tahun 2017. "Benar, ada dua orang tersangka yang ditahan," kata Donny Charles Go.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Dua Pejabat Bengkayang Ditahan

Sambungan dari halaman 1

Hanya saja, Donny enggan menyebut kapasitas dua tersangka tersebut. Menurutnya, kedua tersangka itu saat ini sudah ditahan sejak dua hari lalu untuk proses penyidikan lebih lanjut.

"Sejak dua hari yang lalu sudah dilakukan penahanan," lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dianggap yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Namun begitu, Donny mengatakan tidak menutup kemungki-

nan akan ada tersangka baru dalam kasus ini.

Sebelumnya Polda Kalbar telah menetapkan dua orang tersangka BB dan IR yang tak lain merupakan pegawai Badan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Bengkayang. "Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kami belum melakukan pemanggilan lagi," katanya.

Sementara total kerugian dari Penghitungan Kekayaan Negara (PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam perkara



Bansus Desa Kabupaten Bengkayang mencapai Rp19 miliar. Polda Kalbar disebutkan berhasil menyelamatkan aset dengan menyita Rp9 miliar.

“Yang bikin lama (kasus ini) adalah proses penghitungan kerugian negara. Dimintakan suratnya Maret 2018, selesainya 8 November 2019, 18 bulan lebih,” ungkapnya.

Indikasi penyelewengan dana bermula saat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang, menyalurkan uang Rp 20 miliar dengan nilai bervariasi ke rekening 48 desa pada 29 Desember 2017.

Penyaluran dana tersebut dilakukan tanpa adanya proposal pengajuan dari pemerintah desa. Atas petunjuk pihak BPKAD kepada pemerintah desa, dana yang disalurkan itu untuk membayar pekerjaan fisik kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh BPKAD, tanpa termuat sebelumnya di dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan.

Pekerjaan itu juga tidak dilengkapi dengan dokumen progres pekerjaan serta dokumen pembayaran, dan

berakibat pada pembayaran yang tidak sesuai dengan program kerja anggaran.

Setelah pengiriman dana itu, pihak desa baru diminta membuat proposal pengajuan dengan dibantu konsultan yang telah disiapkan oleh BPKAD.

“Pekerjaan fisik itu tidak hanya yang dikerjakan tahun 2017, tetapi ada juga tahun 2016. Inikan pelanggaran,” kata Donny.

Dari rangkaian penyelidikan, dari 48 rekening desa yang menerima dana tersebut, 23 di antaranya belum melakukan pencarian. Menurut Donny, uang di 21 dari 23 rekening desa tersebut telah disita pihak kepolisian. Jumlahnya mencapai Rp 6,6 miliar. Sementara, 2 desa sisanya masih dalam proses.

“Untuk 25 desa yang telah mencairkan itu masih dalam penyelidikan kami, untuk mengetahui dan melacak ke mana saja alirannya,” katanya.

Dikatakan Donny, dalam penanganan kasus ini, Polda Kalbar telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Salah satu super-

visi mereka adalah menyita dana yang belum dicarikan itu untuk mengamankan uang negara,” ujar dia.

Dalam rangkaian penyelidikan, telah diperiksa sebanyak 174 orang saksi, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kabupaten Bengkayang, sejumlah orang di BPKAD dan dinas terkait, serta 48 orang kepala desa dan 29 bendahara desa.

Dari mereka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 48 rekening koran milik desa, dokumen APBDesa, kuitansi pembayaran pekerjaan dari kepala desa kepada pelaksana proyek dan perangkat elektronik berupa komputer dan telepon genggam.

Kepolisian juga melibatkan dua orang ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ahli keuangan negara. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan penyidik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan ahli teknis untuk menilai dan mengecek fisik pekerjaan yang telah dilakukan dan dibayar menggunakan dana tersebut, untuk mengetahui jumlah kerugian negara. (arf)